



## Direct Election Of Regional Heads By The People From A Utilitarian Perspective

### Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Menurut Perspektif Utilitarianisme

Krida Kurina Jaya<sup>1</sup>, Hari Wiyanto<sup>2</sup>, Marsudi Dedi Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[kridakurinajaya@gmail.com](mailto:kridakurinajaya@gmail.com), <sup>2</sup>[hariw14.hw@gmail.com](mailto:hariw14.hw@gmail.com), <sup>3</sup>[marsudiputra1976@gmail.com](mailto:marsudiputra1976@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [23 July 2024]  
Revised [29 Sept 2024]  
Accepted [10 Oct 2024]

#### KEYWORDS

Regional Head Election,  
Utilitarianism Theory, Welfare  
as Whole

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dalam konteks teori utilitarianisme. Pemilihan langsung ini adalah bagian integral dari sistem demokrasi modern di banyak negara, termasuk Indonesia, yang memberikan warga negara, khususnya masyarakat daerah, hak suara langsung untuk memilih pemimpin daerah mereka sendiri. Namun, dalam perspektif utilitarianisme, keputusan politik dan tindakan pemerintah diukur berdasarkan konsekuensi atau dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah langsung dapat dijustifikasi dari sudut pandang utilitarianisme, dengan mempertimbangkan efektivitas pemimpin yang terpilih, partisipasi politik, dan dampaknya terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Melalui analisis mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan prinsip-prinsip utilitarianisme, serta implikasinya terhadap praktek demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan adil dalam sistem pemilihan kepala daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip utilitarianisme dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### ABSTRACT

*This research aims to analyze the direct election of regional heads by the people in the context of utilitarianism theory. This direct election is an integral part of the modern democratic system in many countries, including Indonesia, which gives citizens, especially regional communities, direct voting rights to elect their own regional leaders. However, in the perspective of utilitarianism, political decisions and government actions are measured based on their consequences or impact on the happiness and welfare of society as a whole. Therefore, this research will explore the extent to which a direct regional head election system can be justified from a utilitarianism perspective, taking into account the effectiveness of elected leaders, political participation, and their impact on social and economic justice. Through in-depth analysis, it is hoped that this research can provide deeper insight into the relationship between the direct election of regional heads by the people and the principles of utilitarianism, as well as their implications for the practice of democracy and regional government governance in Indonesia. The results of this research can also provide a valuable contribution in developing more effective and fair policies in the regional head election system, in accordance with the principles of utilitarianism in achieving the welfare of society as a whole.*

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah praktek demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemilihan langsung ini memberikan hak suara langsung kepada warga negara, khususnya masyarakat daerah, untuk memilih pemimpin daerah mereka sendiri, yang diharapkan mampu mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam konteks teori utilitarianisme, sistem pemilihan kepala daerah juga dapat dipertimbangkan dari sudut pandang konsekuensialisme, di mana keputusan dan tindakan diukur berdasarkan konsekuensi atau dampaknya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarianisme, sebagai teori etika konsekuensial, menekankan bahwa tindakan yang diambil harus menghasilkan dampak yang paling menguntungkan bagi sebagian besar orang atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pendekatan utilitarianisme menyoroti pentingnya memastikan bahwa proses pemilihan dan keputusan yang diambil oleh rakyat menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan sosial dan kemajuan masyarakat.

Dalam konteks ini, sangat krusial untuk mengeksplorasi berbagai aspek terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, baik dari perspektif demokrasi maupun utilitarianisme. Pertama-

tama, sistem pemilihan kepala daerah langsung memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses politik dan pemerintahan, yang merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi representatif. Hal ini penting karena memberikan legitimasi kepada pemimpin yang terpilih, karena mereka dipilih langsung oleh warga negara. Namun, dalam mengaplikasikan perspektif utilitarianisme, penting untuk mengkaji apakah sistem pemilihan langsung ini benar-benar menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai faktor, seperti efektivitas pemimpin yang terpilih dalam mengelola pemerintahan daerah, keberlanjutan pembangunan dan kemajuan masyarakat, serta keadilan dan keberagaman dalam representasi politik.

Di Indonesia, sistem pemilihan kepala daerah langsung telah diterapkan sejak reformasi pada tahun 1998, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, pemilihan langsung ini juga menghadirkan tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan praktik politik yang tidak sehat, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi dalam proses pemilihan. Dengan mengadopsi perspektif utilitarianisme, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pemilihan kepala daerah langsung memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan analisis terhadap efektivitas pemimpin yang terpilih dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik, tingkat partisipasi politik dan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan, serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

## LANDASAN TEORI

### Utilitarianisme dalam Konteks Demokrasi

Utilitarianisme, sebagai teori etika, berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Dalam konteks pemilihan langsung kepala daerah, teori ini menilai sistem pemilihan berdasarkan seberapa efektifnya sistem tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini mencakup aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan representasi kepentingan masyarakat.

### Efektivitas Pemilihan Langsung dalam Mencapai Kesejahteraan Sosial

Penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip utilitarianisme. Pemilihan langsung memungkinkan pemilih untuk memilih pemimpin yang dianggap paling mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas pemerintahan.

### Dampak Partisipasi Politik terhadap Legitimasi dan Akuntabilitas

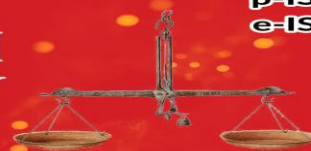
Partisipasi politik yang tinggi sering dikaitkan dengan legitimasi pemerintahan yang lebih baik dan akuntabilitas yang lebih besar. Dalam perspektif utilitarianisme, tingkat partisipasi yang tinggi dapat diartikan sebagai indikator dari efektivitas sistem pemilihan dalam mencerminkan kepentingan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi banyak orang.

### Polarisasi Politik dan Efek Negatifnya

Utilitarianisme juga mengakui potensi dampak negatif dari sistem pemilihan, seperti polarisasi politik, yang dapat mengurangi kesejahteraan sosial. Penelitian harus mempertimbangkan bagaimana sistem pemilihan langsung dapat mengurangi atau memperburuk polarisasi dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup beberapa langkah penting dalam menganalisis pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dalam konteks teori utilitarianisme. Pertama, peneliti memulai dengan tinjauan literatur yang menyeluruh tentang konsep pemilihan kepala daerah langsung dan teori utilitarianisme. Langkah ini bertujuan untuk memahami kerangka konseptual yang mendasari topik penelitian dan menganalisis kontribusi teori utilitarianisme dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kedua, peneliti mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di Indonesia. Ini termasuk mengkaji undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait yang mengatur proses pemilihan dan penjabaran teori utilitarianisme dalam konteks hukum positif.



Selanjutnya, peneliti melakukan analisis normatif terhadap kerangka hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan teori utilitarianisme. Ini melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana kerangka hukum yang ada memfasilitasi pencapaian tujuan utama teori utilitarianisme, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, peneliti juga melibatkan analisis terhadap efektivitas dan keberhasilan praktik pemilihan kepala daerah secara langsung dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini termasuk mengevaluasi partisipasi politik, kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, serta dampak kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang terpilih. Terakhir, penelitian ini akan menyimpulkan dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip utilitarianisme. Rekomendasi ini akan didasarkan pada temuan penelitian terkait kontribusi praktik pemilihan langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta analisis kebutuhan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam sistem yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Interpretasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Menurut Perspektif Teori Utilitarianisme

Konsep pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat menjadi titik sentral dalam praktek demokrasi modern di banyak negara, termasuk Indonesia. Prinsip dasar demokrasi langsung memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, termasuk memilih pemimpin daerah mereka sendiri. Namun, dalam konteks teori utilitarianisme, pemilihan kepala daerah harus dinilai berdasarkan dampak atau konsekuensinya terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Teori Utilitarianisme, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan oleh John Stuart Mill, menekankan bahwa tindakan yang diambil harus menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi sebagian besar orang atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pendekatan utilitarianisme menyoroti pentingnya memastikan bahwa proses pemilihan dan keputusan yang diambil oleh rakyat menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan sosial. Dalam perspektif utilitarianisme, aspek utama yang perlu dievaluasi adalah sejauh mana pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dapat dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mencapai tujuan utama teori utilitarianisme, yaitu meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemilihan langsung ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pertimbangan utama dalam evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung dari sudut pandang utilitarianisme adalah efektivitas pemimpin yang terpilih dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemimpin yang dipilih seharusnya mampu mengimplementasikan kebijakan dan program yang berdampak positif bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan tingkat partisipasi politik dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Partisipasi yang tinggi dapat menunjukkan tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam politik lokal, yang merupakan aspek penting dalam memperkuat demokrasi. Partisipasi yang rendah, di sisi lain, dapat mengindikasikan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Dalam konteks utilitarianisme, partisipasi politik yang tinggi dapat dianggap sebagai faktor positif karena meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih dan memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam keputusan politik yang diambil. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa partisipasi politik yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas keputusan politik yang diambil, dan masih diperlukan evaluasi terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Dampak sistem pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat juga perlu dievaluasi dalam konteks keadilan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif utilitarianisme, penting untuk memastikan bahwa sistem pemilihan ini tidak hanya menguntungkan segmen masyarakat tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat secara adil. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap distribusi keuntungan dan kerugian dari keputusan politik yang diambil, serta upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang mungkin timbul dari proses pemilihan ini. pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, saat dilihat dari perspektif teori utilitarianisme, harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi ini harus mempertimbangkan efektivitas pemimpin yang terpilih, tingkat partisipasi politik, dan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan politik yang diambil. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara pemilihan kepala daerah dan

prinsip-prinsip utilitarianisme, serta implikasinya terhadap praktek demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

### **Tingkat Partisipasi Politik Pada Sistem Pemilihan Kepala Daerah Langsung Oleh Rakyat Dalam Mempengaruhi Keputusan Dan Tindakan Pemimpin Yang Terpilih**

Partisipasi politik dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat memiliki dampak yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemimpin yang terpilih. Tingkat partisipasi politik yang tinggi dapat meningkatkan legitimasi pemerintah yang terpilih. Partisipasi yang luas menunjukkan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan pemimpin yang terpilih, yang pada gilirannya memperkuat otoritas dan keabsahan keputusan pemerintah. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses politik dan pemimpin yang terpilih akan merasa lebih bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa tingkat partisipasi politik yang tinggi tidak selalu menjamin kualitas keputusan politik yang diambil. Adanya fenomena partisipasi pasif atau partisipasi yang hanya bersifat formal dapat menghasilkan pemimpin yang terpilih tidak selalu mewakili kepentingan mayoritas atau tidak memiliki dukungan yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana partisipasi politik yang tinggi dapat diarahkan ke arah yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Selain itu, tingkat partisipasi politik juga mempengaruhi agenda politik yang diusulkan dan diimplementasikan oleh pemimpin yang terpilih. Partisipasi yang tinggi dapat memperkuat representasi kepentingan masyarakat dalam agenda politik, karena pemimpin yang terpilih akan lebih cenderung memperhatikan isu-isu yang relevan dan mendesak bagi warga negara. Hal ini dapat mengarah pada penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya publik. Namun demikian, perlu diingat bahwa partisipasi politik yang tinggi juga dapat menjadi alat untuk mendorong agenda politik yang sempit atau menguntungkan kelompok tertentu saja. Fenomena polarisasi politik dan mobilisasi kelompok kepentingan tertentu dapat menghasilkan pembelahan masyarakat dan mempengaruhi agenda politik yang diambil oleh pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana memperkuat mekanisme partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa agenda politik yang diusulkan dan diimplementasikan mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat.

Tingkat partisipasi politik juga berdampak pada akuntabilitas pemimpin yang terpilih. Partisipasi yang tinggi dapat memperkuat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemimpin, karena warga negara akan lebih aktif dalam memantau tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Namun demikian, partisipasi politik yang tinggi juga dapat menciptakan harapan yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja pemimpin yang terpilih. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, serta meningkatkan risiko ketegangan sosial atau konflik politik.

Tingkat partisipasi politik memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan dan tindakan pemimpin yang terpilih dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Partisipasi politik yang tinggi dapat memperkuat legitimasi pemerintah, mempengaruhi agenda politik, dan mendorong akuntabilitas pemimpin. Namun, perlu diingat bahwa partisipasi politik juga dapat memiliki dampak yang kompleks dan memerlukan pengelolaan yang cermat untuk memastikan bahwa sistem politik yang ada mampu mencerminkan kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat secara adil dan efektif.

### **Rekomendasi Kebijakan Yang Dapat Dirumuskan Untuk Memperbaiki Sistem Pemilihan Kepala Daerah Agar Lebih Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Utilitarianisme Dalam Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Secara Keseluruhan**

Prinsip utilitarianisme menekankan bahwa keputusan politik dan tindakan pemerintah harus menghasilkan dampak yang paling menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam merumuskan rekomendasi kebijakan, perlu dipertimbangkan berbagai aspek yang dapat memperkuat hubungan antara pemilihan kepala daerah dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pertama-tama, penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam proses pemilihan kepala daerah. Langkah-langkah seperti penyediaan informasi yang jelas tentang calon dan platform politik mereka, serta penyelenggaraan debat publik antara calon, dapat membantu meningkatkan partisipasi dan memungkinkan masyarakat daerah untuk membuat keputusan



yang lebih objektif. Ini juga akan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemilih didasarkan pada pemahaman yang baik tentang implikasi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pemimpin yang terpilih. Pembentukan badan independen yang bertugas untuk memantau kinerja pemimpin, menginvestigasi laporan pelanggaran etika atau hukum, dan memberikan sanksi jika diperlukan, dapat membantu memastikan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini juga akan memberikan jaminan bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin dipandu oleh prinsip-prinsip utilitarianisme dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Program-program pendidikan politik dan kampanye sosialisasi yang ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas, pemuda, dan perempuan, dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya partisipasi politik dan hak suara mereka dalam pemilihan kepala daerah. Pemberdayaan masyarakat dalam proses politik juga akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemimpin mewakili kepentingan seluruh masyarakat. Di samping itu, Selain itu, perlu diperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga sipil dan non-pemerintah dalam memantau dan mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam proses politik. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta dapat membantu memperkuat kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diusulkan oleh pemimpin mempertimbangkan implikasi mereka terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Evaluasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang diusulkan harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan hasil yang paling menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat.

Prinsip-prinsip utilitarianisme harus dijadikan panduan dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, diharapkan sistem pemilihan kepala daerah dapat lebih sesuai dengan prinsip-prinsip utilitarianisme dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penguatan aksesibilitas dan transparansi, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, serta upaya untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan akan membantu memastikan bahwa keputusan politik dan tindakan pemimpin yang terpilih memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip-prinsip utilitarianisme.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Pemilihan langsung kepala daerah harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial jika proses pemilihan dilakukan secara efektif dan adil, serta jika keputusan politik yang diambil memberikan manfaat untuk semua lapisan masyarakat. Partisipasi politik yang tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan legitimasi pemerintah, mempengaruhi agenda politik, dan memperkuat akuntabilitas pemimpin. Namun, perlu diwaspadai bahwa partisipasi yang tinggi juga dapat menyebabkan polarisasi politik. Untuk memperbaiki sistem pemilihan agar sesuai dengan prinsip utilitarianisme, penting untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas, memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas, serta memastikan partisipasi politik yang inklusif. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi kebijakan harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat.

### Saran

Untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah agar lebih sesuai dengan prinsip utilitarianisme, beberapa langkah kunci perlu diterapkan. Pertama, transparansi dan aksesibilitas proses pemilihan harus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang jelas tentang calon dan prosedur pemilihan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan partisipasi dapat diperluas. Selanjutnya, pengawasan dan akuntabilitas perlu diperkuat dengan menerapkan mekanisme pengawasan yang ketat, seperti audit rutin dan laporan publik, untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Selain itu, penting untuk memfasilitasi partisipasi politik yang inklusif dengan mendorong keterlibatan dari berbagai kelompok masyarakat, agar keputusan politik mencerminkan kebutuhan dan aspirasi yang beragam. Evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang

diterapkan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat. Terakhir, program pendidikan politik harus dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses politik dan hak-hak mereka sebagai pemilih. Dengan langkah-langkah ini, sistem pemilihan dapat lebih efektif dalam mencerminkan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, 2014, "Implikasi Konsep Utilitarianisme Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Terhadap Masyarakat Adat", dimuat dalam *Jurnal MMH Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jilid 43 No. 2*.
- Aziz, N. M., 2009, "Perkembangan Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah", dimuat dalam *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI*.
- Gani, I. A., 2019, "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dan Perbandingannya dengan AS, Belanda, dan India", dimuat pada *Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. 21 No. 3*.
- Liando, D. M., 2016, "PEMILU DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", dimuat pada *Jurnal LPPM Bidang EkSosBudKum Vol. 3 No. 2 Edisi Oktober 2016*.
- Pradana, S. A., 2022, "Utilitarianisme Dan Perannya Dalam Proses Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD)", dimuat pada *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat AL-MULK Vol. 1 No. 1*.
- Pratiwi, E. dkk., 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?", dimuat pada *Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 2*.
- Tia Subekti, 2018, *PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*, Skripsi yang dipertahankan pada Tahun 2014 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.
- Tim Kompas, 2022, *Pendekatan Utilitarianisme dalam Pemilihan Kepala Daerah*, dimuat pada <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/04270386/pendekatan-utilitarianisme-dalam-pemilihan-kepala-daerah>.